



PDRB SUMBA BARAT MENURUT PENGGUNAAN 2011-2013



**PDRB SUMBA BARAT
MENURUT PENGGUNAAN
2011-2013**

<https://sumbabaratkab.go.id>

PDRB SUMBA BARAT MENURUT PENGGUNAAN 2011-2013

ISBN : -

No. Publikasi : 53015.0101

Katalog BPS : 9302008.5301

Ukuran Buku : 21,59 cm x 27,94 cm

Jumlah Halaman : vi + 34 Halaman / Pages

Naskah :

BPS Kabupaten Sumba Barat

Penyunting :

Seksi Statistik Neraca Wilayah, dan Analisis Statistik

Gambar Kulit :

Seksi Statistik Neraca Wilayah, dan Analisis Statistik

Diterbitkan oleh :

BPS Kabupaten Sumba Barat

Dicetak oleh :

CV. Bima Media Mandiri

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Disadari bahwa luasnya jangkauan informasi statistik di daerah akan banyak memberikan jaminan bagi usaha perencanaan dan evaluasi berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh daerah yang bersangkutan. Untuk itu kelengkapan serta akurasi data yang disajikan sangat diperlukan demi mempertajam analisis bagi kalangan pengambil keputusan atau pembuat kebijakan, sehingga arah kebijakan dapat diambil secara tepat.

Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenan-Nya, Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat telah selesai melaksanakan tugas dalam upaya memenuhi tuntutan ketersediaan data di atas dengan melakukan penghitungan serta mempublikasikan PDRB Sumba Tengah Menurut Penggunaan, yang meliputi seluruh kategori penggunaan. Data-data Produk Domestik Regional Bruto disajikan dalam bentuk tabel-tabel pokok serta tabel-tabel turunan.

Guna lebih memperjelas terminologi yang digunakan, disajikan pula konsep, definisi dan metodologi yang telah diaplikasikan dalam menyusun publikasi ini.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan publikasi ini kami ucapkan banyak terima kasih. Kritik dan saran untuk penyempurnaan publikasi ini di masa mendatang sangat diharapkan.

Waikabubak, Oktober 2014

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Sumba Barat,



Ir. Suprih Handayani
NIP. 19660703 199401 2 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vi
PENJELASAN UMUM	1
1 Pendahuluan.....	2
2 PDRB Penggunaan.....	3
3 Ruang Lingkup dan Definisi.....	5
4 Metode Penghitungan dan Sumber Data	13
ULASAN SINGKAT	15
1 Komponen Penggunaan PDRB.....	17
2 Laju Pertumbuhan Penggunaan PDRB.....	20
TABEL-TABEL	28

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel A	Komposisi Penggunaan PDRB Sumba Barat Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011-2013.....	18
Tabel B	Laju Pertumbuhan Penggunaan PDRB Sumba Barat Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011-2013.....	21
Tabel 1	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sumba Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Komponen Penggunaan Tahun 2011-2013.....	28
Tabel 2	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sumba Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Komponen Penggunaan Tahun 2011-2013.....	29
Tabel 3	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sumba Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Komponen Penggunaan Tahun 2011-2013.....	30
Tabel 4	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sumba Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Menurut Komponen Penggunaan Tahun 2011-2013.....	31
Tabel 5	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sumba Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Menurut Komponen Penggunaan Tahun 2011-2013.....	32
Tabel 6	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sumba Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Menurut Komponen Penggunaan Tahun 2011-2013.....	33
Tabel 7	Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sumba Barat Menurut Komponen Penggunaan Tahun 2011-2013.....	34

PENJELASAN UMUM

<https://sumbabaratkab.bps.go.id>

1. PENDAHULUAN

Salah satu sasaran pembangunan adalah tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup dan berkesinambungan. Secara lebih khusus, pembangunan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam konteks regional, usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara akumulatif akan sama dengan usaha untuk meningkatkan pendapatan regional.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian regional adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu wilayah dan dalam periode tertentu. Sistem penilaian yang umum digunakan untuk menghitung PDRB ada dua, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, biasanya digunakan untuk melihat struktur ekonomi dan pergeserannya. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar harga konstan ini digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun.

Tahun dasar yang digunakan dalam publikasi ini adalah tahun dasar 2000 (sebelumnya tahun 1993). Perubahan ini dilakukan karena serial perhitungan PDRB dengan menggunakan tahun dasar sebelumnya (1993) dianggap sudah terlalu tua (lama). Selain itu serial tahun dasar tersebut dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan atau kondisi ekonomi yang terjadi.

Perhitungan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) macam pendekatan, yaitu pendekatan produksi (lapangan usaha), pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran atau penggunaan. Konsepnya adalah sebagai berikut:

1. PDRB dari segi produksi adalah jumlah nilai neto dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).
2. PDRB dari segi pendapatan adalah jumlah balas jasa (pendapatan) yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).
3. PDRB dari segi pengeluaran adalah jumlah pengeluaran yang dilakukan untuk konsumsi rumahtangga, pemerintah, dan lembaga swasta yang tidak mencari untung serta pengeluaran untuk investasi dan ekspor suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).

2. PDRB PENGGUNAAN

PDRB yang disajikan menurut penggunaan dapat memperlihatkan komposisi penggunaan barang dan jasa. Secara umum, dari segi penggunaannya barang dan jasa yang dihasilkan dari berbagai sektor ekonomi dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Barang dan jasa yang di gunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam proses produksi yang disebut dengan konsumsi antara (*intermediate consumption*).
2. Barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi konsumsi masyarakat baik masyarakat individu maupun lembaga yang disebut konsumsi akhir (*final consumption*) dan investasi. Konsumsi akhir ini mencakup:
 - a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga nirlaba
 - b. Pengeluaran konsumsi pemerintah
 - c. Pembentukan modal tetap bruto
 - d. Perubahan stok
 - e. Ekspor dan impor

Barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi permintaan akhir dapat berasal dari produk domestik (wilayah sendiri) maupun impor baik dari luar negeri maupun dari wilayah lain di Indonesia. Secara matematik keadaan ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$Y + M = C + I + Is + E$$

di mana:

Y = Produk Domestik Regional Bruto

M = Impor

C = Konsumsi Rumah Tangga, Pemerintah dan Lembaga Nirlaba

I = Pembentukan Modal Tetap Bruto

Is = Perubahan Stok

E = Ekpor

Yang dihitung dalam hal ini adalah produk domestik (produk yang ditimbulkan di daerah tersebut), maka persamaan tersebut dapat diturunkan menjadi:

$$Y = C + I + Is + E - M$$

Oleh karena itu dalam penyajian PDRB menurut penggunaan dihitung komponen-komponen permintaan akhir.

Penyusunan PDRB menurut komponen penggunaan memiliki peran yang cukup penting, terutama untuk melakukan analisis pola permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu entitas ekonomi. Melalui analisis ini dapat diketahui masing-masing proporsi PDRB yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi atau investasi. Jika proporsi konsumsi terlalu besar dapat diduga bahwa peningkatan kapasitas perekonomian di wilayah tersebut akan relatif berat, karena sumber daya yang digunakan untuk investasi akan mengecil. Dari analisis ini juga dapat diketahui mengenai 'kebocoran' yang mungkin diderita sebagai akibat besarnya impor untuk

memenuhi permintaan yang ada. Informasi ini dapat digunakan untuk memperkaya masukan rumusan kebijakan bagi perencana pembangunan.

3. RUANG LINGKUP DAN DEFINISI

Konsep dan definisi yang digunakan dalam menghitung setiap komponen penggunaan tersebut, secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Konsumsi Rumah Tangga

Konsumsi rumah tangga mencakup semua pengeluaran barang dan jasa (baik barang tahan lama maupun barang tidak tahan lama) dikurangi hasil penjualan neto (penjualan dikurangi pembelian) barang-barang bekas dan barang tidak terpakai yang dilakukan oleh suatu rumah tangga selama satu tahun. Konsumsi rumah tangga ini termasuk juga barang yang tidak di produksi kembali seperti karya seni, barang antik dan lain-lain. Pengeluaran atas rumah yang ditempati seperti sewa rumah, perbaikan ringan, rekening listrik, air, telepon dan lain-lain, juga merupakan pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Konsep pengeluaran rumah tangga yang dipakai dalam komponen Produk Domestik Regional Bruto adalah pengeluaran konsumsi rumahtangga penduduk, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam wilayah domestik di tambah dengan pembelian langsung oleh rumah tangga penduduk di luar region, dikurangi dengan pengeluaran rumah tangga bukan penduduk yang dilakukan di wilayah domestik. Dengan demikian, semua pengeluaran oleh anggota rumah tangga staf kedutaan asing, staf perwakilan daerah, anggota militer, dan lain-lain yang berada di suatu wilayah, serta pengeluaran turis asing; tidak dimasukkan sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga yang sedang mengadakan perjalanan dinas yang pengeluarannya dibiayai oleh perusahaan atau kantor, juga tidak termasuk dalam

konsumsi rumah tangga, karena merupakan biaya antara dari perusahaan atau kantor yang bersangkutan.

b. Konsumsi Lembaga Swasta yang tidak Mencari Untung (Nirlaba)

Lembaga swasta yang tidak mencari untung (Nirlaba) adalah bagian dari sektor institusi yang memberikan gambaran dari seluruh proses ekonomi dan peran yang dilakukan oleh beberapa sektor dalam ekonomi. Sektor institusi dalam total ekonomi dikelompokkan ke dalam lima sektor yaitu, korporasi finansial, korporasi non finansial, pemerintahan umum, rumah tangga dan Lembaga Swasta Nirlaba.

Lembaga Swasta Nirlaba menyediakan barang dan jasa kepada anggotanya dan rumah tangga secara gratis atau atas harga ekonomi yang tidak berarti secara ekonomi. Lembaga Nirlaba adalah lembaga swasta yang dalam operasinya tidak bertujuan mencari keuntungan. Pengeluaran konsumsi lembaga ini mencakup semua pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa, pembayaran upah dan gaji, penerimaan transfer, penyusutan dan pajak tidak langsung neto, dikurangi dengan penjualan barang-barang bekas atau tidak pakai.

Lembaga nirlaba ini diantaranya adalah lembaga/badan swasta yang memberikan pelayanan atas jasa kepada masyarakat seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi profesi, perkumpulan sosial dan kebudayaan/olahraga dan hobi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan dan organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa. Lembaga/badan yang tidak mencari untung yang merupakan bagian kegiatan dari pemerintah, tidak termasuk dalam lembaga swasta yang dimaksud di sini. Ciri-ciri unit lembaga nirlaba adalah sbb:

- lembaga nirlaba umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang mempunyai hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan penting yang diambil lembaga;

- setiap anggota lembaga mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus;
- istilah *nirlaba* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada kegiatan sejenis

c. Konsumsi Pemerintah

Pengeluaran konsumsi pemerintah adalah jumlah seluruh pengeluaran pemerintah yang meliputi pembelian barang dan jasa (belanja barang), pembayaran balas jasa pegawai (belanja pegawai) dan penyusutan barang modal dikurangi dengan hasil penjualan barang dan jasa (output pasar) pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pemerintah.

Kegiatan pemerintahan ini mencakup kegiatan administrasi pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah, serta administrasi pertahanan dan keamanan. Pemerintah daerah terdiri atas pemerintah pada tingkat provinsi, kabupaten, dan desa. Sedangkan Pemerintah pusat meliputi semua badan/lembaga tinggi negara, departemen, dan unsur departemen serta instansi lain beserta jajarannya di daerah sebagai dinas instansi vertikal. Dalam kegiatan ini tidak termasuk kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan milik negara seperti Perum, PT (Persero, PN), dan lainnya, karena kegiatan-kegiatan ini telah tercakup dalam sektor yang bersangkutan atau lapangan usaha masing-masing.

Penghitungan secara langsung untuk konsumsi pemerintah tidak mungkin dilakukan karena produksi sektor ini tidak ada/tidak dijual. Oleh karena itu, perkiraan

nilai yang dikonsumsi sendiri dilakukan dengan menghitung besarnya biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan pemerintahan. Biaya yang dimaksud ini mencakup:

1. Pengeluaran pemerintah untuk membayar upah dan gaji pegawai sebagai balas jasa yang diberikan. Untuk selanjutnya disebut sebagai belanja pegawai, di mana pegawai di sini mencakup pegawai pemerintah pusat dan pegawai pemerintah daerah, baik sipil maupun militer.
2. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa yang habis dipakai dalam proses produksi, selanjutnya disebut belanja barang. Dalam belanja barang di sini, termasuk juga belanja perjalanan dinas pegawai, biaya perbaikan kendaraan dinas, perbaikan kantor, dan rumah dinas dan pengeluaran rutin lainnya. Pembelian terhadap barang-barang modal tidak termasuk di sini, kecuali pembelian barang-barang untuk keperluan pertahanan dan keamanan. Pengeluaran pemerintah untuk penyediaan barang-barang strategis seperti bahan pangan dan bahan bakar tidak dimaksudkan dalam pengeluaran konsumsi pemerintahan, akan tetapi dimasukkan sebagai stok.
3. Pengeluaran penyusutan barang-barang modal pemerintah.

Pengeluaran konsumsi pemerintah didapat dengan menjumlahkan ketiga pengeluaran di atas dikurangi hasil penjualan barang dan jasa pemerintah. Hasil penjualan barang dan jasa ini mencakup penerimaan barang dan jasa yang dijual pemerintah kepada masyarakat, baik individu masyarakat maupun lembaga dengan tidak mengambil keuntungan atau kemungkinan dibayar di bawah harga pokok produksi, maupun penerimaan penjualan hasil produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan sebagai unit industri (hasil penjualan karcis masuk gedung museum, gedung kesenian, atau kebun binatang yang dikelola oleh pemerintah), penjualan buku publikasi, bibit pertanian, dan sebagainya.

d. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan modal tetap bruto dalam suatu region adalah semua barang modal baru yang digunakan atau dipakai sebagai alat untuk proses produksi di suatu region itu sendiri. Jenis barang yang dikategorikan ke dalam barang-barang modal adalah barang-barang yang mempunyai umur satu tahun atau lebih. Barang-barang yang tidak dapat diproduksi kembali seperti tanah, cadangan mineral, tidak termasuk dalam pembentukan modal tetap bruto. Namun, pengeluaran untuk meningkatkan penggunaan tanah seperti pembukaan hutan untuk dijadikan areal perkebunan, daerah pemukiman, bendungan, dan lain-lain serta perluasan areal pertambangan, semuanya termasuk pengeluaran untuk pembentukan modal tetap bruto .

Pengeluaran untuk perbaikan barang-barang modal yang mengakibatkan bertambahnya umur pemakaian atau menambah kapasitas produksi dari barang-barang modal tersebut juga merupakan pengeluaran untuk pembentukan modal tetap bruto. Sementara penjualan neto dari barang-barang modal bekas dan barang-barang modal afkiran dari dalam region tidak termasuk pembentukan modal tetap bruto, karena barang tersebut sudah dihitung sebagai barang modal pada pertama kali beli. Lain halnya dengan barang modal bekas yang dibeli dari luar region adalah merupakan pembentukan modal tetap bruto, karena di dalam region barang tersebut belum pernah dihitung.

Pembelian atau pembuatan barang tahan lama untuk keperluan perlengkapan militer, seperti barang-barang untuk pertahanan, tank, persenjataan, bangunan, dan barang-barang pertahanan lainnya, tidak termasuk dalam pembentukan modal, karena bersifat konsumtif. Pembentukan modal tetap bruto mencakup:

1. Pembentukan modal tetap di sektor bangunan yang terdiri dari atas:
 - a) Bangunan tempat tinggal
 - b) Bangunan bukan tempat tinggal
 - c) Bangunan atau konstruksi lainnya, seperti jalan, jembatan, irigasi, pembangkit tenaga listrik dan jaringan, instalasi telekomunikasi, pemancar televisi, bandar

udara, pelabuhan laut/sungai, jaringan pipa untuk minyak, gas, air, dan lain-lain.

2. Pembentukan modal tetap dalam bentuk mesin dan alat-alat perlengkapan yang terdiri atas:
 - a) Alat-alat transport, seperti kapal, pesawat udara, kereta api, bus, truk, dan lain-lain.
 - b) Mesin-mesin dan alat perlengkapan untuk industri listrik dan pertambangan.
 - c) Mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan untuk pertanian.
 - d) Mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan untuk pembuatan jembatan, jalan, dan lain-lain.
 - e) Mesin-mesin dan perabot untuk keperluan kantor, toko, hotel, restoran, rumah sakit, dan lain-lain.
3. Perluasan perkebunan dan penanaman baru untuk tanaman keras. Pengertian konsep tanaman keras di sini adalah bermacam-macam tanaman yang hasilnya baru diperoleh setelah berumur satu tahun atau lebih. Termasuk juga di sini pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan perkebunan besar selama perkebunan itu belum mendatangkan hasil dan kegiatan penanaman kembali (reboisasi) yang dilakukan pemerintah/perusahaan.
4. Tanaman yang dapat diambil hasilnya secara berulang, penambahan ternak yang khusus dipelihara untuk diambil susunya, bulunya, atau untuk dipakai tenaganya, kecuali ternak yang dipelihara untuk dipotong
5. Margin perdagangan, *service charge* dan ongkos-ongkos pemindahan hak milik dalam transaksi jual beli tanah, eksplorasi sumber mineral, *software computer*, hiburan, kesusastraan, benda-benda seni, perbaikan besar yang menambah usia/nilai guna barang modal, hak perusahaan hutan, hak paten, hak cipta (barang modal tidak berwujud) termasuk dalam pembentukan modal tetap.

Dalam hal bangunan atau konstruksi dicatat sebagai pembentukan modal tetap bruto jika sudah ada kontrak penjualan atau dilakukan sendiri. Bangunan yang belum selesai/jadi yang belum ada kontrak penjualan dicatat sebagai inventori (persediaan). Sedangkan untuk mesin-mesin dan alat-alat perlengkapannya yang dalam proses pembuatannya, tidak termasuk dalam penghitungan modal tetap bruto, tetapi merupakan inventori dari produsennya.

e. Perubahan Stok

Menurut Sistem Neraca Nasional 2008, yang dimaksud dengan perubahan inventori atau perubahan stok ini adalah persediaan yang dikuasai oleh unit yang menghasilkan untuk digunakan dalam proses lebih lanjut, atau diberikan pada pihak lain, atau digunakan dengan cara lain.

Konsep stok di sini adalah persediaan barang-barang pada akhir tahun baik berasal dari pembelian yang akan dipakai sebagai input pada suatu kegiatan ekonomi atau untuk dijual, maupun barang yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang belum dijual, baik barang yang sudah jadi maupun yang sedang dalam proses (setengah jadi).

Pemerintah adalah salah satu pemegang stok barang-barang keperluan strategis seperti bahan pangan (beras, gula, dan minyak sayur) dan non pangan (pupuk dan BBM) yang akan dikeluarkan ke pasaran pada waktu krisis. Pemegang stok yang lain adalah produsen dan pedagang. Stok pada produsen pada umumnya berupa bahan mentah/baku, barang-barang atau alat-alat yang diproduksi tetapi masih dalam proses atau barang-barang yang belum dipasarkan.

f. Ekspor dan Impor

Aktivitas ekspor-impor kabupaten/kota di Indonesia diyakini sudah terjadi sejak dulu kala, yaitu sebelum daerah ini disebut sebagai kabupaten/kota. Jenis produksi barang dan jasa yang saling melengkapi dan disparitas harga menjadi faktor utama munculnya kegiatan transaksi ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi

kebutuhan secara penuh akan berusaha mendatangkan dari daerah/negara lain. Pada sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestik juga terdorong memperluas pasar ke luar daerah bahkan ke luar negeri. Seiring perkembangan zaman, maka produksi dan permintaan masyarakat akan barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi juga semakin memungkinkan distribusi barang dan jasa menjadi lancar. Kondisi tersebut mendorong aktifitas ekspor-impor barang dan jasa di kabupaten/kota semakin berkembang.

Ekspor dan impor mencakup transaksi barang dan jasa antara masyarakat suatu region dengan masyarakat region lain (termasuk dengan negara lain). Transaksi dari beberapa barang tertentu, seperti barang dan jasa yang langsung dibeli di pasar domestik/regional dilakukan oleh bukan penduduk region tersebut.

Barang-barang yang melintasi batas geografis suatu region, akan tetapi hanya merupakan tempat persinggahan saja dalam perjalanan ke tempat tujuan misalnya barang-barang untuk peragaan, barang-barang milik turis atau penumpang, tidak termasuk kegiatan ekspor dan impor. Tetapi barang-barang keperluan pelayaran atau penerbangan yang dibeli pada saat merapat atau mendarat di pelabuhan luar negeri atau region dan ikan yang langsung dijual oleh kapal-kapal penangkap ikan milik penduduk atau region kepada kapal asing atau region lain, adalah merupakan transaksi barang dan jasa yang harus dimasukkan dalam ekspor dan impor.

Cakupan transaksi ekspor-impor barang dan jasa kabupaten/kota sama dengan cakupan transaksi ekspor-impor nasional ke luar negeri, yang membedakan hanya mitra transaksinya. Dalam ekspor-impor barang dan jasa nasional ke luar negeri, yang menjadi mitra adalah residen luar negeri, sedangkan dalam ekspor-impor kabupaten/kota yang menjadi mitra adalah residen kabupaten/ kota lain di Indonesia dan luar negeri.

3. METODE PENGHITUNGAN DAN SUMBER DATA

Penghitungan setiap komponen penggunaan dalam PDRB dilakukan dengan pendekatan yang berbeda satu sama lain. Hal ini disesuaikan dengan ketersediaan data yang digunakan sebagai dasar penghitungan. Secara singkat metode penghitungan dan sumber datanya dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Konsumsi Rumah Tangga

Sumber data utama perkiraan nilai konsumsi rumah tangga, adalah hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari hasil SUSENAS, diperoleh rata-rata konsumsi perkapita per minggu untuk bahan makanan dan rata-rata nilai konsumsi perkapita perbulan untuk non makanan. Dari hasil ini kemudian dapat diperkirakan nilai konsumsi selama satu tahun. Setelah itu dikalikan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Nilai konsumsi rumah tangga atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara deflasi, yaitu membagi nilai konsumsi harga berlaku dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) golongan makanan untuk konsumsi makanan dan IHK umum untuk konsumsi bukan makanan.

b. Konsumsi Pemerintah

Data mengenai belanja pegawai, belanja barang, dan belanja rutin lainnya serta perkiraan belanja pembangunan yang merupakan belanja rutin diperoleh dari realisasi pengeluaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengeluaran pemerintah daerah dalam hal ini daerah otonom provinsi, kabupaten/kota, dan tingkat desa diperoleh dari daftar K1, K2, dan K3. Perkiraan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan diperoleh dengan mengekstrapolasi nilai tambah bruto pada tahun dasar dengan indeks pegawai negeri.

c. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Ditinjau dari sudut pemilikan, pembentukan modal tetap bruto dapat dihitung berdasarkan pengeluaran untuk pembelian barang modal oleh masing-masing lapangan usaha (sektor). Sedangkan kalau ditinjau dari jenis barang modal itu sendiri maka pembentukan modal dapat dihitung berdasarkan arus barang.

Perkiraan pembentukan modal tetap bruto atas dasar harga yang berlaku, diperoleh dengan cara menghitung nilai barang-barang modal yang masuk baik barang modal baru maupun bekas dari luar negeri dan atau luar region dan modal yang masuk antar region atau antar pulau, ditambahkan dengan persentasi tertentu terhadap nilai produksi bruto sektor konstruksi/bangunan, dikurangi barang modal yang ke luar wilayah.

Perkiraan nilai pembentukan modal tetap bruto atas dasar harga konstan tahun 2000, diperoleh dengan cara men-*deflate* nilai pembentukan modal tetap bruto (nilai barang impor) atas dasar harga yang berlaku dengan indeks harga perdagangan besar impor, dan dengan indeks harga perdagangan besar sektor industri untuk barang modal antar pulau masuk.

d. Perubahan Stok

Perubahan stok pada suatu tahun diperoleh dari seluruh nilai stok pada akhir tahun dikurangi dengan seluruh nilai stok pada akhir tahun sebelumnya. Penghitungannya dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu:

1. Metode Langsung

Nilai stok di peroleh dari setiap kegiatan dan jenis barang yang dikumpulkan melalui sensus dan survei. Berdasarkan laporan neraca keuangan perusahaan dari hasil survei tahunan diperoleh nilai stok pada awal tahun dan akhir tahun, yang kemudian dinilai dengan rata-rata harga pasar pada periode tahun perhitungan tersebut.

2. Metode Tidak Langsung (Metode Arus Barang)

Yaitu dengan menghitung stok awal dan stok akhir dari setiap jenis barang. Data seperti ini mungkin tersedia hanya untuk beberapa jenis barang. Oleh karena itu maka komponen perubahan stok diestimasi berdasarkan residual dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung secara sektoral dikurangi dengan komponen-komponen penggunaan yang sudah dihitung dengan data yang tersedia, yaitu konsumsi rumahtangga, konsumsi lembaga nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto dan ekspor neto (ekspor-impor) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

e. Ekspor dan Impor

Data yang tersedia mengenai ekspor dan impor pada tingkat region masih sangat terbatas. Ekspor dan impor di tingkat region ini meliputi transaksi yang dilakukan langsung dengan luar negeri dan antar pulau atau antar provinsi. Dari nilai ekspor dan impor luar negeri maupun antar pulau masing-masing tahun diperoleh nilai ekspor dan impor atas dasar harga berlaku.

Untuk memperoleh nilai ekspor atas dasar harga konstan 2000 dengan cara sebagai berikut, nilai ekspor di-*deflate* dengan indeks harga perdagangan besar umum ekspor tanpa minyak dan nilai impor di-*deflate* dengan indeks harga perdagangan besar kelompok impor.

Nilai barang yang keluar antar pulau atau harga antar region atas harga konstan 2000 diperoleh dengan cara men-*deflate* masing-masing nilai barang dan jasa dengan IHPB umum. Data mengenai ekspor dan impor luar negeri diperoleh dari statistik tahunan ekspor dan impor terbitan dari BPS.

ULASAN SINGKAT

<https://sumbabaratkab.lnpg.go.id>

Sesuai dengan uraian sebelumnya, PDRB dari sisi penggunaan akan mencakup seluruh produk akhir yang digunakan atau dikonsumsi oleh para konsumen akhir. Dengan kata lain, PDRB dapat pula dipandang sebagai seluruh produk yang digunakan untuk memenuhi permintaan akhir.

Permintaan akhir, yaitu permintaan yang bukan untuk keperluan produksi, pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu permintaan akhir domestik dan permintaan akhir dari luar wilayah. Permintaan akhir domestik terdiri atas konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, dan pembentukan modal tetap bruto. Sedangkan permintaan akhir dari luar wilayah terdiri atas ekspor dan impor. Pada prakteknya, penyediaan produk akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi suatu wilayah seringkali tidak mampu memenuhi seluruh permintaan akhir yang ada. Dalam hal ini maka perlu didatangkan produk akhir dari luar wilayah, yang terdiri dari ekspor dan impor.

Uraian berikut akan memperlihatkan komposisi penggunaan PDRB di Sumba Barat dan perkembangannya.

1. KOMPOSISI PENGGUNAAN PDRB

Komposisi penggunaan PDRB Sumba Barat selama kurun 2011-2013 secara umum tidak mengalami perubahan yang berarti. Demikian pula untuk komposisi penggunaan PDRB pada tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Proporsi terbesar penggunaan PDRB Sumba Barat hingga saat ini masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga, meskipun nilai kontribusinya selama 3 tahun terakhir mengalami penurunan. Secara rata-rata dalam tiga tahun terakhir, konsumsi rumah tangga mencapai 69,67 persen dari PDRB. Tahun 2011 proporsi komponen ini sebesar 70,05 persen dan pada tahun 2012 mencapai 69,75 persen. Pada tahun 2013 proporsinya kembali mengalami sedikit penurunan menjadi 69,21 persen terhadap PDRB Sumba Barat.

Tabel A
Komposisi Komponen Penggunaan PDRB Sumba Barat
Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2011-2013

Rincian	(Persen)			
	2011*)	2012**)	2013**)	Rata-rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Konsumsi Rumah Tangga	70.05	69.75	69.21	70.05
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nir Laba	3.69	3.70	3.70	3.69
3. Konsumsi Pemerintah	33.58	34.58	35.57	33.58
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	15.88	16.46	17.03	15.88
5. Ekspor	18.14	18.86	20.02	18.14
6. Impor	42.79	44.84	47.21	42.79
7. Perubahan Inventori	1.46	1.48	1.67	1.46
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan :

**) Angka Sementara*

****) Angka Sangat Sementara*

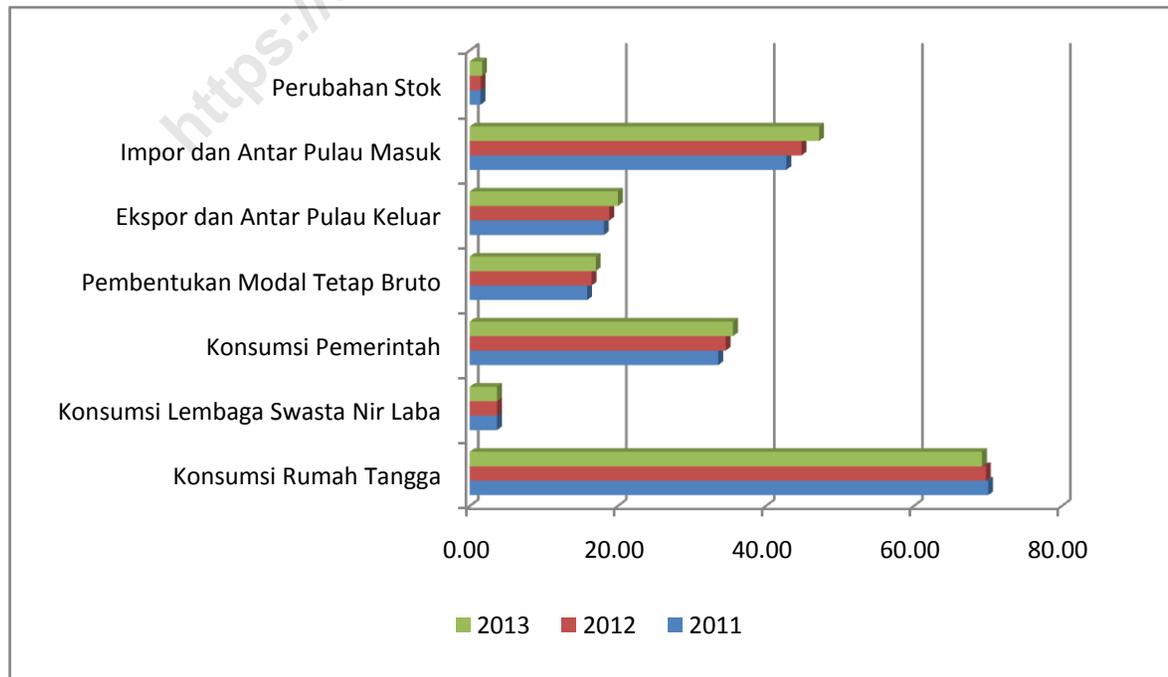
Konsumsi yang diserap pemerintah juga relatif besar, yakni berada pada kisaran 33 sampai 35 persen. Nilai ini cenderung selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Secara rata-rata, proporsi konsumsi pemerintah mencapai 34,58 persen dari PDRB Sumba Barat selama 3 tahun terakhir.

Di sisi lain, ekspor mampu memberikan kontribusi secara rata-rata sekitar 19,01 persen. Namun, perekonomian di Sumba Barat masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap wilayah lain. Hal ini dapat dilihat dari proporsi impor pada kurun waktu yang sama. Proporsi impor pada penggunaan PDRB merupakan yang terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga, yaitu secara rata-rata mencapai 44,94 persen.

Tahun 2011 proporsi impor mencapai 42,79 persen, dan pada tahun 2012 mencapai 44,84 persen. Pada tahun 2013 proporsinya kembali mengalami peningkatan menjadi 47,21 persen terhadap PDRB Sumba Barat. Hal ini menunjukkan bahwa untuk sebesar 47,21 persen pemenuhan kebutuhan barang dan jasa permintaan para konsumen akhir di Sumba Barat pada tahun 2013, didatangkan dari luar daerah atau impor. Sejah in fenomena nilai kontribusi impor yang besar ini masih dapat dimaklumi mengingat Kabupaten Sumba Barat belum mampu dalam memenuhi kebutuhan warganya hanya dengan mengandalkan hasil sumber daya alam wilayah sendiri.

Sementara itu, sumbangan yang diberikan oleh pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada tahun 2011 sebesar 15,88 persen dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya, hingga pada tahun 2013 sumbangannya menjadi sebesar 17,03 persen.

Grafik A
Komposisi Penggunaan PDRB Sumba Barat
Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2011-2013

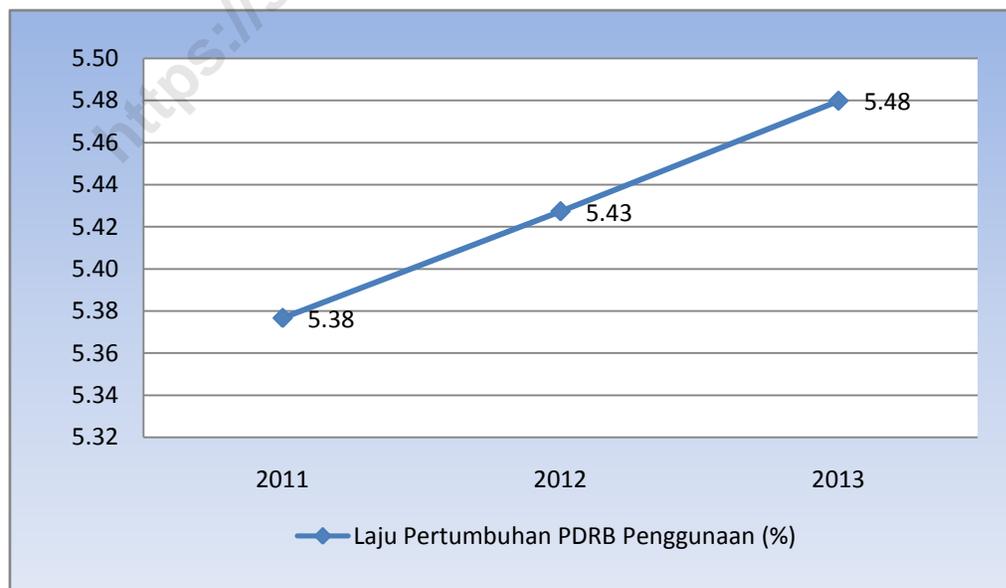


Pola penggunaan PDRB Sumba Barat tersebut pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan pola penggunaan PDRB Nusa Tenggara Timur maupun PDB pada level nasional. Konsumsi rumah tangga masih memiliki proporsi yang cukup besar dalam perekonomian nasional. Namun, proporsi pembentukan modal tetap bruto pada skala nasional jauh lebih tinggi dibanding proporsi komponen ini pada perekonomian Nusa Tenggara Timur pada umumnya dan Sumba Barat pada khususnya.

2. LAJU PERTUMBUHAN PENGGUNAAN PDRB

Pertumbuhan PDRB Sumba Barat menunjukkan arah yang positif selama kurun waktu 2011-2013. Pertumbuhan ini cenderung meningkat dan rata-ratanya mencapai 5,43 persen.

GrafikB
Laju Pertumbuhan PDRB Sumba Barat
Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2011-2013



Pertumbuhan PDRB Sumba Barat atas dasar harga konstan pada tahun 2011 mencapai 5,38 persen. Pada tahun 2012 pertumbuhannya meningkat menjadi 5,43 persen, dan pada tahun 2013 menjadi 5,48 persen.

Secara lebih rinci, laju pertumbuhan penggunaan PDRB dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel B
Laju Pertumbuhan Komponen Penggunaan PDRB Sumba Barat
Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2011-2013

Rincian (1)	(Persen)			
	2011*) (2)	2012**) (3)	2013**) (4)	Rata-rata (5)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4.62	4.65	4.72	4.62
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nir Laba	6.32	6.33	6.36	6.32
3. Konsumsi Pemerintah	7.34	7.36	7.56	7.34
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	8.82	8.86	8.92	8.82
5. Ekspor	3.78	3.85	3.95	3.78
6. Impor	5.49	5.60	5.81	5.49
7. Perubahan Inventori	5.65	5.69	5.76	5.65
PDRB	5.38	5.43	5.48	5.38

Keterangan :

**) Angka Sementara*

***) Angka Sangat Sementara*

a. Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Dalam hal ini rumah tangga berfungsi sebagai pengguna akhir (*final demand*) dari berbagai jenis barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan

kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan (UN, 1993). Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup seluruh pengeluaran barang dan jasa oleh penduduk suatu wilayah, baik dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik penduduk yang bersangkutan.

Pertumbuhan dalam penggunaan komponen konsumsi rumah tangga terhadap PDRB Sumba Barat, selama kurun waktu 2011-2013 secara rata-rata sebesar 4,66 persen. Selama kurun waktu ini, pertumbuhan penggunaan konsumsi rumah tangga cenderung meningkat, dimana pada tahun 2011 pertumbuhannya mencapai 4,62 persen, kemudian pada tahun 2012 menjadi 4,65 persen, dan pada tahun 2013 meningkat kembali menjadi 4,72 persen.

b. Konsumsi Lembaga Swasta Nir Laba

Lembaga swasta nirlaba merupakan bagian dari Lembaga Non Profit (LNP) secara keseluruhan. Sesuai dengan fungsinya LNP terdiri dari LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumah tangga. Sedangkan yang dimaksud LNPRT adalah lembaga yang menyediakan barang dan jasa secara gratis atau pada harga yang tidak berarti secara ekonomi kepada anggotanya atau rumahtangga dan tidak dikontrol oleh pemerintah. Harga yang tidak berarti secara ekonomi adalah harga yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah yang produsen ingin sediakan dan pada jumlah yang pembeli ingin beli.

Pertumbuhan penggunaan PDRB Sumba Barat untuk konsumsi lembaga swasta nirlaba selama kurun waktu 2011-2013 memiliki rata-rata mencapai 6,33 persen. Pertumbuhan penggunaan komponen ini cenderung semakin meningkat dari tahun ke tahun.

c. Konsumsi Pemerintah

Pemerintahan umum adalah salah satu sektor domestik Sistem Neraca Nasional 2008. Salah satu fungsi pemerintahan umum berperan sebagai produsen non-pasar yang menyediakan barang dan jasa bagi individu

rumatangga atau komunitas, secara gratis atau dengan harga yang tak signifikan secara ekonomi. Pengeluaran konsumsi pemerintahan tingkat kabupaten/kota mencakup pengeluaran konsumsi pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan; pengeluaran konsumsi pemerintah pusat yang menjadi bagian pemerintah kabupaten/kota; pengeluaran konsumsi pemerintah provinsi yang menjadi bagian dari pemerintah kabupaten/kota; dan pengeluaran konsumsi seluruh pemerintah desa dalam kab/kota bersangkutan.

Nilai laju pertumbuhan konsumsi pemerintah ini mengalami kecenderungan untuk terus menurun dengan rata-rata mencapai 6,51 persen selama 3 tahun terakhir. Rata-rata pertumbuhan ini adalah yang terbesar bila dibandingkan dengan komponen penggunaan PDRB lainnya.

Pada tahun 2011 pertumbuhan komponen ini mencapai 7,34 persen. Selanjutnya, pertumbuhan ini mengalami peningkatan mencapai 7,36 persen pada tahun 2012 dan 7,56 persen pada tahun 2013.

d. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Perkembangan ekonomi suatu daerah sangat dipengaruhi oleh adanya investasi di daerah tersebut. Investasi tersebut terutama investasi fisik (kapital) merupakan faktor utama selain tenaga kerja yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Secara teori, adanya investasi di sektor dunia usaha akan menaikkan tingkat produksi yang secara otomatis akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada sektor tersebut. Sehingga semakin tinggi investasi dilakukan, diharapkan semakin tinggi pula tingkat pertumbuhan ekonomi. Nilai investasi fisik merupakan salah satu faktor yang utama dalam mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu wilayah.

Dalam PDB/PDRB Investasi fisik direalisasikan direfleksikan dalam bentuk besaran komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori penambahan kapital atau yang dikenal sebagai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). PMTB merupakan nilai arus barang modal yang terjadi akibat penambahan barang modal baru dikurangi pengurangan barang modal

bekas, ditambah perbaikan besar atas barang modal atau aset tetap dan biaya transfer/pemindahan kepemilikan atas aset-aset yang tak diproduksi. Sedangkan perubahan inventori merupakan perubahan kuantitas bahan baku, penolong, barang jadi dan setengah jadi maupun suku cadang yang di kuasai perusahaan.

Pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto dalam perekonomian Sumba Barat pada kurun waktu 2011-2013 secara rata-rata mencapai 8,87 persen. Pada tahun 2011, pertumbuhan penggunaan pembentukan modal bruto mencapai 8,82 persen, kemudian pada tahun 2012 menjadi 8,86 persen, dan pada tahun 2013 meningkat lagi menjadi 8,92 persen.

Penambahan fixed aset atau yang dikenal sebagai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada prinsipnya diharapkan akan meningkatkan kapasitas produksi yang pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan yang diperoleh pada suatu kegiatan ekonomi. Sehingga penghitungan PMTB menjadi sangat penting untuk mengukur efisiensi yang dicapai suatu aktifitas ekonomi di suatu daerah.

e. Ekspordan Impor

Ekspor-impor barang dan jasa kabupaten/kota didefinisikan sebagai transaksi alih kepemilikan ekonomi (baik berupa penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen kabupaten/kota dengan pelaku ekonomi non-residen yang berasal dari luar kabupaten/kota baik Indonesia maupun luar negeri (*United Nations*, 2009: 56).

Secara umum, aktivitas ekspor-impor kabupaten/kota lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan ekspor-impor nasional ke luar negeri. Faktor yang membuat transaksi ekspor-impor kabupaten/kota ini lebih mudah di antaranya adalah:

- transaksi ekspor dan impor antar kabupaten/kota tidak memerlukan perijinan tertentu dan tidak dikenai tarif impor ataupun pajak ekspor;
- jarak antar daerah relatif lebih dekat; dan
- faktor selera masyarakat relatif sama.

Dilihat dari sisi partner transaksi, ekspor-impor kabupaten/kota dapat dilakukan dengan negara lain (ekspor-impor luar negeri) dan atau kabupaten/kota lain (ekspor-impor antar kabupaten). Dengan kondisi ini membuat transaksi ekspor-impor kabupaten/kota menjadi punya peran yang besar dalam pembentukan PDRB kabupaten/kota. Besarnya peran ekspor-impor kabupaten/kota terhadap PDRB diyakini lebih besar dibandingkan peran ekspor-impor nasional terhadap PDB. Peran ekspor-impor kabupaten/kota juga diyakini punya peran yang relatif besar dibandingkan komponen lain dalam membentuk PDRB kabupaten/kota.

Pertumbuhan penggunaan PDRB Sumba Barat untuk ekspor pada tahun 2011 mencapai 3,78 persen, pada tahun 2012 mencapai 3,85 persen, dan pada tahun 2013 mencapai 3,95 persen. Dengan demikian, rata-rata pertumbuhan komponen ekspor ini adalah sekitar 3,86 persen. Angka ini adalah yang terkecil dibanding pertumbuhan komponen lainnya.

Pertumbuhan penggunaan PDRB Sumba Barat untuk impor secara umum lebih besar dibandingkan dengan ekspor. Pada tahun 2011 pertumbuhannya mencapai 5,49 persen, pada tahun 2012 mencapai 5,69 persen, dan pada tahun 2013 mencapai 5,76 persen.

Secara umum, untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur komoditas yang paling banyak diekspor adalah tanaman pangan dan peternakan, sedangkan komoditas yang paling banyak diimpor berasal dari industri makanan dan minuman.

f. Perubahan Inventori

Dalam persepsi makro, inventori merupakan sub-komponen dari investasi, di mana inventori merupakan aset perusahaan paling mahal yang mencerminkan 40% total modal yang diinvestasikan. Adapun dalam persepsi mikro, inventori merupakan komponen aset atau harta lancar perusahaan. Fungsi inventori atau stok, antara lain adalah untuk mengantisipasi permintaan konsumen; memasangkan produksi dengan distribusi; mengambil keuntungan dari potongan

harga; melakukan hedging terhadap inflasi dan perubahan harga ; menghindari kekurangan stok karena cuaca, kekurangan pasokan, masalah mutu, atau pengiriman yang tidak tepat ; serta menjaga agar operasi berlangsung dengan baik. Barang – barang yang termasuk ke dalam kelompok inventori, antara lain :

1. Barang jadi : persediaan barang yang selesai diproses dan menunggu untuk dikirimkan/dijual ;
2. Barang setengah jadi (WIP) : telah mengalami beberapa perubahan tetapi belum selesai ;
3. Bahan baku & penolong (Bahan mentah) : bahan yang telah dibeli namun belum diproses/digunakan ;
4. Perlengkapan pemeliharaan/perbaikan/operasi (MRO) : merupakan persediaan yang untuk perlengkapan, pemeliharaan, perbaikan dan operasi.

Perubahan inventori memiliki pertumbuhan yang fluktuatif selama kurun waktu 2011-2013, dimana pada tahun 2011 pertumbuhannya mencapai 5,65 persen, kemudian naik menjadi 5,43 persen pada tahun 2012, dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2013 menjadi 5,48 persen.

TABEL-TABEL

<https://sumbabaratkab.go.id>

TABEL 1.
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN SUMBA BARAT
MENURUT KOMPONEN PENGGUNAAN
ATAS DASAR HARGA BERLAKU
TAHUN 2011 - 2013

(Ribuan Rp.)

Rincian	2011*)	2012**)	2013**)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Konsumsi Rumah Tangga	571 704 616.9	644 226 758.5	729 261668.6
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nir Laba	30 087 033.97	34 288 270.23	38 979 563.18
3. Konsumsi Pemerintah	274 076 502.9	320 914 547.1	374 824 690.3
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	129 580 320.4	15 277 4871.7	179 463 379
5. Ekspor	148 058 950.1	175 048 958.5	210 913280.8
6. Impor	349 226 229.6	414 543 954.2	497 381 303.3
7. Perubahan Inventori	11 913 501.66	15 236 173.58	17 563 446.37
PDRB	816 194 696.2	927 945 625.5	1 053 624 725

Keterangan :

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

TABEL 2.
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN SUMBA BARAT
MENURUT KOMPONEN PENGGUNAAN
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000
TAHUN 2011 - 2013

(Ribuan Rp.)

Rincian	2011*)	2012**)	2013**)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Konsumsi Rumah Tangga	264444897.92	276793516.72	289854024.85
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nir Laba	13278287.82	14118883.50	15016223.51
3. Konsumsi Pemerintah	96533703.84	103639631.56	111477626.11
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	45819283.24	49877004.42	54328425.58
5. Ekspor	79125105.74	82168523.73	85413467.71
6. Impor	187143175.97	197614198.62	209091300.10
7. Perubahan Inventori	4253294.58	4495204.30	4754056.40
PDRB	316311397.17	333478565.63	351752524.07

Keterangan :

**) Angka Sementara*

****) Angka Sangat Sementara*

TABEL 3.
DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN SUMBA BARAT MENURUT KOMPONEN PENGGUNAAN
ATAS DASAR HARGA BERLAKU
TAHUN 2011 - 2013

(Persen)

Rincian	2011*)	2012**)	2013**)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Konsumsi Rumah Tangga	70.05	69.75	69.21
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nir Laba	3.69	3.70	3.70
3. Konsumsi Pemerintah	33.58	34.58	35.57
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	15.88	16.46	17.03
5. Ekspor	18.14	18.86	20.02
6. Impor	42.79	44.84	47.21
7. Perubahan Inventori	1.46	1.48	1.67
PDRB	100,00	100,00	100,00

Keterangan :

**) Angka Sementara*

****) Angka Sangat Sementara*

TABEL 4.
DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN SUMBA BARAT MENURUT KOMPONEN PENGGUNAAN
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000
TAHUN 2011 - 2013

(Persen)

Rincian	2011*)	2012**)	2013**)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Konsumsi Rumah Tangga	83.60	83.00	82.40
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nir Laba	4.20	4.23	4.27
3. Konsumsi Pemerintah	30.52	31.08	31.69
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	14.49	14.96	15.45
5. Ekspor	25.01	24.64	24.28
6. Impor	59.16	59.26	59.44
7. Perubahan Inventori	1.34	1.35	1.35
PDRB	100,00	100,00	100,00

Keterangan :

**) Angka Sementara*

****) Angka Sangat Sementara*

TABEL 5.
LAJU PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN SUMBA BARAT MENURUT KOMPONEN PENGGUNAAN
ATAS DASAR HARGA BERLAKU
TAHUN 2011 - 2013

(Persen)

Rincian	2011*)	2012**)	2013**)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Konsumsi Rumah Tangga	13.28	12.90	13.20
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nir Laba	13.95	13.64	13.68
3. Konsumsi Pemerintah	17.14	16.75	16.80
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	17.81	17.56	17.47
5. Ekspor	18.10	17.89	20.49
6. Impor	19.16	18.81	19.98
7. Perubahan Inventori	15.29	14.94	15.27
PDRB	13.83	13.69	13.54

Keterangan :

**) Angka Sementara*

****) Angka Sangat Sementara*

TABEL 6.
LAJU PERUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN SUMBA BARAT MENURUT KOMPONEN PENGGUNAAN
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000
TAHUN 2011 - 2013

(Persen)

Rincian	2011*)	2012**)	2013**)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4.62	4.65	4.72
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nir Laba	6.32	6.33	6.36
3. Konsumsi Pemerintah	7.34	7.36	7.56
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	8.82	8.86	8.92
5. Ekspor	3.78	3.85	3.95
6. Impor	5.49	5.60	5.81
7. Perubahan Inventori	5.65	5.69	5.76
PDRB	5.38	5.43	5.48

Keterangan :

**) Angka Sementara*

****) Angka Sangat Sementara*

TABEL 7.
INDEKS IMPLISIT PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN SUMBA BARAT MENURUT KOMPONEN PENGGUNAAN
TAHUN 2011 – 2013
(TAHUN 2000 = 100.00)

Rincian	2011*)	2012**)	2013**)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Konsumsi Rumah Tangga	215.99	233.01	251.60
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nir Laba	226.39	241.95	259.58
3. Konsumsi Pemerintah	283.67	308.49	336.23
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	282.56	305.16	330.33
5. Ekspor	186.96	212.24	246.93
6. Impor	186.45	209.77	237.88
7. Perubahan Inventori	279.85	304.35	369.44
PDRB	257.80	277.25	299.54

Keterangan :

**) Angka Sementara*

****) Angka Sangat Sementara*

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://sumbabar.kab.bps.go.id>



BPS Kabupaten Sumba Barat

Jl. Wee Karou Waikabubak - Sumba Barat

Nusa Tenggara Timur 87000

Telp/Fax. (0837) 21256 Email: bps5301@bps.go.id